



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
DAN
WALI KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp641.306.283.240,00 (enam ratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp29.479.503.667,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp611.826.779.573,00 (enam ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp618.348.022.950,00 (enam ratus delapan belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. berkurang sebesar Rp34.070.811.037,80 (tiga puluh empat miliar tujuh puluh juta delapan ratus sebelas ribu tiga puluh tujuh koma delapan rupiah); dan
3. jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp584.277.211.912,20 (lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus dua belas koma dua rupiah).

b. Belanja Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp639.639.616.571,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

2. berkurang sebesar Rp29.479.503.667,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah); dan
 3. jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp610.160.112.904,00 (enam ratus sepuluh miliar seratus enam puluh juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat rupiah).
- c. pembiayaan Daerah, terdiri atas:
1. penerimaan pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. semula sebesar Rp22.958.260.290,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. bertambah sebesar Rp4.591.307.370,80 (empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh koma delapan rupiah); dan
 - c. jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp27.549.567.660,80 (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh koma delapan).
 2. pengeluaran pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. semula sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - b. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - c. jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
 3. jumlah pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp25.882.900.991,80 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan rupiah); dan
 4. sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Daerah, dengan uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp75.593.282.944,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp3.467.248.047,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah); dan
 3. jumlah Pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp72.126.034.897,00 (tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- b. Pendapatan transfer, dengan uraian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp542.754.740.006,00 (lima ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu enam rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp30.753.412.990,80 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh koma delapan rupiah); dan

3. jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan Rp512.001.327.015,20 (lima ratus dua belas miliar satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima belas koma dua rupiah).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dengan uraian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
2. bertambah sebesar Rp149.850.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
3. jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp149.850.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah, dengan uraian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp15.576.717.548,00 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
2. bertambah sebesar Rp64.630.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
3. jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp15.641.347.548,00 (lima belas miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

b. retribusi Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

1. semula Rp34.992.938.253,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
2. berkurang sebesar Rp182.185.000,00 (seratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
3. jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp34.810.753.253,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dengan uraian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp17.153.003.674,00 (tujuh belas miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
2. bertambah sebesar Rp136.755.721,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah); dan
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp17.289.759.395,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dengan uraian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp7.870.623.469,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
2. berkurang sebesar Rp3.486.448.768,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah); dan
3. jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp4.384.174.701,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat, dengan uraian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp533.042.889.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp36.197.440.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 3. pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp496.845.449.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- b. pendapatan transfer antar Daerah, dengan uraian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp9.711.851.006,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp5.444.027.009,20 (lima miliar empat ratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu sembilan koma dua rupiah); dan
 3. jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan Rp15.155.878.015,20 (lima belas miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima belas koma dua rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :

- a. pendapatan hibah, dengan uraian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp149.850.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 3. jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp149.850.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi, dengan uraian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp515.773.818.197,00 (lima ratus lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp7.398.890.679,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 3. jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp523.172.708.876,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- b. belanja modal, dengan uraian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp55.289.438.374,00 (lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp32.008.279.276,00 (tiga puluh dua miliar delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 3. jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp23.281.159.098,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah).

- c. belanja tidak terduga, dengan uraian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp1.932.569.970,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah); dan
 3. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.067.430.030,00 (dua miliar enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga puluh rupiah).
- d. belanja transfer, dengan uraian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp64.576.360.000,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp2.937.545.100,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah); dan
 3. jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp61.638.814.900,00 (enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. belanja pegawai dengan, uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp303.098.021.647,00 (tiga ratus tiga miliar sembilan puluh delapan juta dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp12.330.532.275,00 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 3. jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp315.428.553.922,00 (tiga ratus lima belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua).
- b. belanja barang dan jasa, dengan uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp200.125.636.592,00 (dua ratus miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp3.520.745.528,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah); dan
 3. jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp196.604.891.064,00 (seratus sembilan puluh enam miliar enam ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh empat rupiah).
- c. belanja bunga, dengan uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 3. jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- d. jumlah belanja hibah, dengan uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp8.290.159.958,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp990.041.068,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta empat puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah); dan

3. jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp7.300.118.890,00 (tujuh miliar tiga ratus juta seratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

e. belanja bantuan sosial, dengan uraian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta rupiah);
2. berkurang sebesar Rp320.855.000,00 (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
3. jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp2.689.145.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. belanja modal peralatan dan mesin, dengan uraian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp8.225.914.930,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
2. berkurang sebesar Rp2.664.342.528,00 (dua miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah); dan
3. jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp5.561.572.402,00 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah).

b. belanja modal bangunan dan gedung, dengan uraian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp1.560.200.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
2. berkurang sebesar Rp511.550.000,00 (lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
3. jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan sebesar Rp1.048.650.000,00 (satu miliar empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dengan uraian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp44.833.705.630,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
2. berkurang sebesar Rp29.785.683.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
3. jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp15.048.022.630,00 (lima belas miliar empat puluh delapan juta dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

d. belanja modal aset tetap lainnya, dengan uraian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp669.617.814,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat belas rupiah);
2. bertambah sebesar Rp569.296.252,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah); dan
3. jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp1.238.914.066,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu enam puluh enam rupiah).

e. belanja modal aset lainnya, dengan uraian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
2. bertambah sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah); dan
3. jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan uraian sebagai berikut :
- a. semula sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - b. berkurang sebesar Rp1.932.569.970,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - c. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp2.067.430.030,00 (dua miliar enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dengan uraian sebagai berikut ;
- a. belanja bagi hasil, dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.904.454.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp11.637.000,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
 3. jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp1.892.817.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- (5) Belanja bantuan keuangan, dengan uraian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp62.671.906.000,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp2.925.908.100,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu seratus rupiah); dan
 3. jumlah bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp59.745.997.900,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan, dengan uraian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp22.958.260.290,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp4.591.307.370,80 (empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh koma delapan rupiah); dan
 3. jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp27.549.567.660,80 (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh koma delapan rupiah).
- b. pengeluaran pembiayaan, dengan uraian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 3. jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

- (1). Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp22.958.260.290,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp3.349.878.080,96 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh koma sembilan puluh enam rupiah); dan
 3. sisa lebih perhitungan anggaran setelah perubahan sebesar Rp26.308.138.370,96 (dua puluh enam miliar tiga ratus delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh koma sembilan puluh enam rupiah).
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dengan uraian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp1.241.429.289,84 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh empat rupiah); dan
 3. penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan sebesar Rp1.241.429.289,84 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh empat rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 3. jumlah penyertaan modal Daerah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp1.166.666.669,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 3. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp1.166.666.669,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - c. pemberian pinjaman Daerah, dengan uraian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 3. jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

Uraian lebih lanjut perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah dan asset lain-lain;
- n. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.

Pasal 12

Ketentuan mengenai panjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

13 OCT 2025
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19920411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto,
pada tanggal 13 Oktober 2025
WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 13 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR (4/79/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan bagian dari mekanisme penganggaran Daerah. Dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menjelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi beberapa alasan sebagai berikut: (1) apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) keadaan darurat; dan (5) keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum APBD meliputi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 menyebabkan perubahan anggaran dan adanya penyesuaian APBD untuk mengurangi setiap anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 117



KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

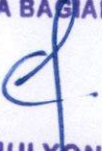
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.593.282.944,00	72.126.034.897,00	-3.467.248.047,00
4.1.01	Pajak Daerah	15.576.717.548,00	15.641.347.548,00	64.630.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	34.992.938.253,00	34.810.753.253,00	-182.185.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.153.003.674,00	17.289.759.395,00	136.755.721,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.870.623.469,00	4.384.174.701,00	-3.486.448.768,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	542.754.740.006,00	512.001.327.015,20	-30.753.412.990,80
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	533.042.889.000,00	496.845.449.000,00	-36.197.440.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.711.851.006,00	15.155.878.015,20	5.444.027.009,20
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	149.850.000,00	149.850.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	149.850.000,00	149.850.000,00
	Jumlah Pendapatan	618.348.022.950,00	584.277.211.912,20	-34.070.811.037,80
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	515.773.818.197,00	523.172.708.876,00	7.398.890.679,00
5.1.01	Belanja Pegawai	303.098.021.647,00	315.424.418.922,00	12.326.397.275,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.125.636.592,00	196.609.028.064,00	-3.516.610.528,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.150.000.000,00	-100.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.290.159.958,00	7.300.118.890,00	-990.041.068,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.010.000.000,00	2.689.145.000,00	-320.855.000,00
5.2	BELANJA MODAL	55.289.438.374,00	23.281.159.098,00	-32.008.279.276,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.225.914.930,00	5.561.572.402,00	-2.664.342.528,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.560.200.000,00	1.048.650.000,00	-511.550.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.833.705.630,00	15.048.022.630,00	-29.785.683.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	669.617.814,00	1.238.914.066,00	569.296.252,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	384.000.000,00	384.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	2.067.430.030,00	-1.932.569.970,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.067.430.030,00	-1.932.569.970,00
5.4	BELANJA TRANSFER	64.576.360.000,00	61.638.814.900,00	-2.937.545.100,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.904.454.000,00	1.892.817.000,00	-11.637.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.671.906.000,00	59.745.997.900,00	-2.925.908.100,00
	Jumlah Belanja	639.639.616.571,00	610.160.112.904,00	-29.479.503.667,00
	Total Surplus/(Defisit)	-21.291.593.621,00	-25.882.900.991,80	-4.591.307.370,80
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.958.260.290,00	27.549.587.660,80	4.591.307.370,80
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.958.260.290,00	26.308.138.370,96	3.349.878.080,96

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.241.429.289,84	1.241.429.289,84
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	0,00
	Pembiayaan Netto	21.291.593.621,00	25.882.900.991,80	4.591.307.370,80
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

13 OCT 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRA MULYONO, SH, MH

NIP. 19320411 201001 1 014

Kota Sawahlunto, 13 Oktober 2025

Walikota

ttd

RIYANDA PUTRA



KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja									Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer					
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32.457.699.722,00	32.586.999.722,00	313.229.190.827,00	325.700.109.537,00	49.051.197.106,00	18.653.815.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.280.387.933,00	344.353.924.672,00	-17.926.463.261,00	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	0,00	122.488.545.450,00	123.642.953.766,00	2.069.804.672,00	2.307.406.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.558.350.122,00	125.950.360.234,00	1.392.010.112,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	122.488.545.450,00	123.642.953.766,00	2.069.804.672,00	2.307.406.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.558.350.122,00	125.950.360.234,00	1.392.010.112,00	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	31.764.324.722,00	31.764.324.722,00	134.450.103.671,00	144.689.394.310,00	988.603.310,00	1.052.448.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.438.706.981,00	145.741.843.205,00	10.303.136.224,00	
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	53.979.312.358,00	59.001.683.218,00	316.793.670,00	231.927.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.296.106.028,00	59.233.610.888,00	4.937.504.860,00	
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	70.327.720.445,00	73.486.384.999,00	515.809.640,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.843.530.085,00	73.986.384.999,00	3.142.854.914,00	
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0002	UPTD PUSKESMAS KOLOK	576.600.000,00	576.600.000,00	819.173.221,00	999.160.819,00	50.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.173.221,00	1.031.160.819,00	161.987.598,00	
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0003	UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN	994.146.650,00	994.146.650,00	1.076.729.024,00	1.443.364.610,00	10.000.000,00	53.538.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.729.024,00	1.496.903.010,00	410.173.986,00	
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0004	UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG	1.042.500.000,00	1.042.500.000,00	1.231.727.236,00	1.590.910.014,00	16.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.727.236,00	1.645.910.014,00	398.182.778,00	
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0005	UPTD PUSKESMAS TALAWI	2.021.631.604,00	2.021.631.604,00	1.928.046.593,00	2.889.036.680,00	80.000.000,00	124.693.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.046.593,00	3.013.730.505,00	1.005.683.912,00	
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0006	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG	688.642.641,00	688.642.641,00	1.098.132.833,00	1.203.876.984,00	0,00	33.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.132.833,00	1.236.885.984,00	138.753.151,00	
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0007	UPTD PUSKESMAS LUNTO	440.803.827,00	440.803.827,00	753.301.042,00	840.812.117,00	0,00	22.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.301.042,00	863.092.117,00	109.791.075,00	
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0008	UPTD INSTALASI FARMASI KOTA	0,00	0,00	3.235.960.919,00	3.234.164.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.960.919,00	3.234.164.869,00	-1.796.050,00	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	163.375.000,00	292.675.000,00	22.114.697.022,00	22.750.085.594,00	44.063.785.505,00	13.040.864.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.178.482.527,00	35.790.950.099,00	-30.387.532.428,00	
1	03	1.03.2.15.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	163.375.000,00	292.675.000,00	21.581.952.669,00	22.108.788.446,00	44.042.903.630,00	13.019.982.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.624.856.299,00	35.128.771.076,00	-30.496.085.223,00	
1	03	1.03.2.15.2.10.01.0001	UPTD ALAT BERAT	0,00	0,00	532.744.353,00	641.297.148,00	20.881.875,00	20.881.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.626.228,00	662.179.023,00	108.552.795,00	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	530.000.000,00	530.000.000,00	12.477.985.368,00	12.722.434.811,00	1.755.000.000,00	2.005.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232.985.368,00	14.728.324.811,00	495.339.443,00	

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	1.04.2.10.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	530.000.000,00	530.000.000,00	12.205.690.873,00	12.450.142.216,00	1.755.000.000,00	2.005.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960.690.873,00	14.456.032.216,00	495.341.343,00		
1	04	1.04.2.10.2.11.01.0001	UPTD RUSUNAWA	0,00	0,00	272.294.495,00	272.292.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.294.495,00	272.292.595,00	-1.900,00		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	14.897.567.895,00	14.990.267.408,00	174.003.619,00	235.077.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.071.571.514,00	15.225.344.675,00	153.773.161,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	10.030.647.488,00	10.457.902.215,00	67.417.499,00	128.283.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.118.064.987,00	10.586.185.237,00	468.120.250,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	4.866.920.407,00	4.532.365.193,00	86.586.120,00	106.794.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953.506.527,00	4.639.159.438,00	-314.347.089,00		
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	0,00	6.800.291.421,00	6.904.973.648,00	0,00	12.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.291.421,00	6.917.101.648,00	116.810.227,00		
1	06	1.06.2.13.2.08.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	6.800.291.421,00	6.904.973.648,00	0,00	12.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.291.421,00	6.917.101.648,00	116.810.227,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.658.062.000,00	1.558.746.645,00	71.858.250.744,00	72.502.249.157,00	996.717.000,00	1.273.658.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.854.977.744,00	73.775.907.167,00	920.929.423,00		
2	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	1.525.704.420,00	1.488.009.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.704.420,00	1.488.009.850,00	-37.694.570,00		
2	02	1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	1.525.704.420,00	1.488.009.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.704.420,00	1.488.009.850,00	-37.694.570,00		
2	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	2.428.818.871,00	2.127.577.191,00	24.100.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.918.871,00	2.141.277.191,00	-311.641.680,00		
2	04	1.04.2.10.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	2.278.128.565,00	1.979.972.885,00	24.100.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.228.565,00	1.993.672.885,00	-308.555.680,00		
2	04	1.04.2.10.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	47.243.600,00	44.157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.243.600,00	44.157.600,00	-3.086.000,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	04	1.04.2.10.2.11.01.0002	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	0,00	0,00	103.446.706,00	103.446.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.446.706,00	103.446.706,00	0,00		
2	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	2.313.030.401,00	1.924.084.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.030.401,00	1.924.084.791,00	-388.945.610,00		
2	06	1.06.2.13.2.08.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	1.277.951.780,00	967.029.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.951.780,00	967.029.400,00	-310.922.380,00		
2	06	1.06.2.13.2.08.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	1.035.078.621,00	957.055.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.078.621,00	957.055.391,00	-78.023.230,00		
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	88.900.000,00	90.040.000,00	11.208.581.029,00	12.442.214.209,00	0,00	13.286.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208.581.029,00	12.455.500.309,00	1.246.919.280,00		
2	09	2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	88.900.000,00	90.040.000,00	11.208.581.029,00	12.442.214.209,00	0,00	13.286.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208.581.029,00	12.455.500.309,00	1.246.919.280,00		
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	25.000.000,00	20.000.000,00	4.014.459.112,00	4.082.732.508,00	195.645.050,00	50.146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210.104.162,00	4.132.878.908,00	-77.225.254,00		
2	12	2.12.5.04.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	25.000.000,00	20.000.000,00	4.014.459.112,00	4.082.732.508,00	195.645.050,00	50.146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210.104.162,00	4.132.878.908,00	-77.225.254,00		
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	56.200.000,00	77.900.000,00	8.471.521.741,00	9.941.865.841,00	470.500.000,00	778.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942.021.741,00	10.720.365.841,00	1.778.344.100,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	56.200.000,00	77.900.000,00	8.471.521.741,00	9.941.865.841,00	470.500.000,00	778.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942.021.741,00	10.720.365.841,00	1.778.344.100,00		
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	0,00	4.921.553.620,00	5.328.343.080,00	23.926.700,00	259.446.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945.480.320,00	5.587.789.840,00	642.309.520,00		
2	16	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	9.902.350,00	7.859.450,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777.350,00	7.859.450,00	-3.917.900,00		
2	16	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	47.326.450,00	29.507.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.326.450,00	29.507.250,00	-17.819.200,00		
2	16	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	4.864.324.820,00	5.290.976.380,00	22.051.700,00	259.446.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886.376.520,00	5.550.423.140,00	664.046.620,00		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.142.962.000,00	1.035.806.645,00	8.929.665.689,00	8.117.749.047,00	228.222.000,00	65.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157.887.689,00	8.182.946.047,00	-974.941.642,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja									Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer					
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.142.962.000,00	1.035.806.645,00	8.929.665.689,00	8.117.749.047,00	228.222.000,00	65.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157.887.689,00	8.182.946.047,00	-974.941.642,00	
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	5.497.244.381,00	5.797.403.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497.244.381,00	5.797.403.916,00	300.159.535,00	
2	18	2.18.2.07.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	239.956.160,00	313.661.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.956.160,00	313.661.960,00	73.705.800,00	
2	18	2.18.2.07.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	5.257.288.221,00	5.483.741.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257.288.221,00	5.483.741.956,00	226.453.735,00	
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	345.000.000,00	335.000.000,00	7.403.716.821,00	7.230.838.822,00	25.324.500,00	64.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429.041.321,00	7.295.221.822,00	-133.819.499,00	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN	345.000.000,00	335.000.000,00	7.403.716.821,00	7.230.838.822,00	25.324.500,00	64.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429.041.321,00	7.295.221.822,00	-133.819.499,00	
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	0,00	5.257.065.769,00	5.103.138.461,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.065.769,00	5.113.138.461,00	-153.927.308,00	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	55.632.700,00	22.162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.632.700,00	22.162.200,00	-33.470.500,00	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	5.201.433.069,00	5.080.976.261,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211.433.069,00	5.090.976.261,00	-120.456.808,00	
2	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	9.886.898.890,00	8.918.291.441,00	18.998.750,00	18.998.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905.897.640,00	8.937.290.191,00	-968.607.449,00	
2	26	3.26.2.19.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	9.886.898.890,00	8.918.291.441,00	18.998.750,00	18.998.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905.897.640,00	8.937.290.191,00	-968.607.449,00	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	640.800.000,00	640.800.000,00	6.078.039.608,00	5.228.166.863,00	171.687.700,00	34.852.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249.727.308,00	5.263.019.743,00	-986.707.565,00	
3	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	3.142.876.150,00	2.124.628.630,00	151.687.700,00	34.852.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.563.850,00	2.159.481.510,00	-1.135.082.340,00	
3	09	2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	100.638.400,00	45.018.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.638.400,00	45.018.400,00	-55.620.000,00	
3	09	2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	3.042.237.750,00	2.079.610.230,00	151.687.700,00	34.852.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193.925.450,00	2.114.463.110,00	-1.079.462.340,00	
3	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	0,00	621.792.850,00	731.319.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.792.850,00	731.319.875,00	109.527.025,00	

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	159.248.675,00	382.907.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.248.675,00	382.907.300,00	223.658.625,00		
3	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	462.544.175,00	348.412.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.544.175,00	348.412.575,00	-114.131.600,00		
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	640.800.000,00	640.800.000,00	2.313.370.608,00	2.372.218.358,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.370.608,00	2.372.218.358,00	38.847.750,00		
3	26	3.26.2.19.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	640.800.000,00	640.800.000,00	2.313.370.608,00	2.372.218.358,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.370.608,00	2.372.218.358,00	38.847.750,00		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	147.500.000,00	113.500.000,00	63.696.547.520,00	61.677.968.816,00	2.918.458.097,00	2.019.777.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.615.005.617,00	63.697.746.815,00	-2.917.259.002,00		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	147.500.000,00	113.500.000,00	32.377.577.870,00	32.758.786.142,00	2.845.608.647,00	1.946.928.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.223.186.517,00	34.705.714.491,00	-517.472.026,00		
4	01	4.01.2.16.2.20.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	147.500.000,00	113.500.000,00	32.377.577.870,00	32.758.786.142,00	2.845.608.647,00	1.946.928.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.223.186.517,00	34.705.714.491,00	-517.472.026,00		
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	31.318.969.650,00	28.919.182.674,00	72.849.450,00	72.849.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.391.819.100,00	28.992.032.124,00	-2.399.786.976,00		
4	02	4.02.2.16.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	31.318.969.650,00	28.919.182.674,00	72.849.450,00	72.849.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.391.819.100,00	28.992.032.124,00	-2.399.786.976,00		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	583.443.961.228,00	549.377.165.545,20	25.013.662.664,00	24.234.877.182,00	56.507.950,00	463.300.575,00	4.000.000.000,00	2.067.430.030,00	64.576.360.000,00	61.638.814.900,00	93.646.530.614,00	88.404.422.687,00	-5.242.107.927,00		
5	01		KEPEGAWAIAN	0,00	0,00	6.469.411.950,00	6.230.868.293,00	13.452.000,00	13.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482.863.950,00	6.244.320.293,00	-238.543.657,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	5.688.530.310,00	5.764.652.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688.530.310,00	5.764.652.913,00	76.122.603,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	715.420.440,00	432.101.180,00	13.452.000,00	13.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.872.440,00	445.553.180,00	-283.319.260,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	65.461.200,00	34.114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.461.200,00	34.114.200,00	-31.347.000,00		
5	02		KEUANGAN	583.443.961.228,00	549.377.165.545,20	12.742.973.179,00	12.808.514.390,00	43.055.950,00	449.848.575,00	4.000.000.000,00	2.067.430.030,00	64.576.360.000,00	61.638.814.900,00	81.362.389.129,00	76.964.607.895,00	-4.397.781.234,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	583.443.961.228,00	549.377.165.545,20	12.742.973.179,00	12.808.514.390,00	43.055.950,00	449.848.575,00	4.000.000.000,00	2.067.430.030,00	64.576.360.000,00	61.638.814.900,00	81.362.389.129,00	76.964.607.895,00	-4.397.781.234,00		
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	0,00	5.801.277.535,00	5.195.494.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.277.535,00	5.195.494.499,00	-605.783.036,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	5.801.277.535,00	5.195.494.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.277.535,00	5.195.494.499,00	-605.783.036,00		
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	8.612.441.956,00	8.199.472.309,00	1.909.665.572,00	632.271.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522.107.528,00	8.831.743.783,00	-1.690.363.745,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	8.612.441.956,00	8.199.472.309,00	1.909.665.572,00	632.271.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522.107.528,00	8.831.743.783,00	-1.690.363.745,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0,00	0,00	8.612.441.956,00	8.199.472.309,00	1.909.665.572,00	632.271.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522.107.528,00	8.831.743.783,00	-1.690.363.745,00		
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	0,00	22.351.469.656,00	21.060.205.590,00	175.604.949,00	203.483.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.527.074.605,00	21.263.688.815,00	-1.263.385.790,00		
7	01		KECAMATAN	0,00	0,00	22.351.469.656,00	21.060.205.590,00	175.604.949,00	203.483.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.527.074.605,00	21.263.688.815,00	-1.263.385.790,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BARANGIN	0,00	0,00	5.552.209.297,00	5.342.916.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552.209.297,00	5.342.916.593,00	-209.292.704,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN DURIAN 1	0,00	0,00	384.379.434,00	375.240.934,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.379.434,00	450.240.934,00	-9.138.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN DURIAN 2	0,00	0,00	516.030.980,00	508.884.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.030.980,00	508.884.758,00	-7.146.222,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN LUBANG PANJANG	0,00	0,00	389.478.536,00	352.685.921,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.478.536,00	427.685.921,00	-36.792.615,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN SARINGAN	0,00	0,00	575.389.065,00	564.870.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.389.065,00	564.870.803,00	-10.518.262,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	0,00	0,00	7.488.375.508,00	6.835.795.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488.375.508,00	6.835.795.021,00	-652.580.487,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0001	KELURAHAN AIR DINGIN	0,00	0,00	382.609.692,00	376.561.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.609.692,00	376.561.801,00	-6.047.891,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0002	KELURAHAN AUR MULYO	0,00	0,00	391.573.956,00	388.069.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.573.956,00	388.069.392,00	-3.504.564,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0003	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA	0,00	0,00	377.511.005,00	362.548.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.511.005,00	362.548.009,00	-14.962.996,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0004	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN	0,00	0,00	383.015.700,00	355.519.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.015.700,00	355.519.650,00	-27.496.050,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0005	KELURAHAN PASAR	0,00	0,00	391.087.507,00	389.227.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.087.507,00	389.227.843,00	-1.859.664,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0006	KELURAHAN TANAH LAPANG	0,00	0,00	350.889.300,00	373.123.260,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.889.300,00	373.123.260,00	-2.766.040,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SILUNGKANG	0,00	0,00	2.685.203.457,00	2.455.463.186,00	0,00	48.083.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.203.457,00	2.503.546.411,00	-181.657.046,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN TALAWI	0,00	0,00	2.483.716.219,00	2.379.298.419,00	604.949,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.321.168,00	2.384.698.419,00	-99.622.749,00		
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	4.934.205.222,00	4.569.659.422,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.805.222,00	4.569.659.422,00	-374.145.800,00		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	4.934.205.222,00	4.569.659.422,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.805.222,00	4.569.659.422,00	-374.145.800,00		
8	01	8.01.1.05.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	4.934.205.222,00	4.569.659.422,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.805.222,00	4.569.659.422,00	-374.145.800,00		
			TOTAL	618.348.022.950,00	584.277.211.912,20	515.773.818.197,00	523.172.708.876,00	55.289.438.374,00	23.281.159.098,00	4.000.000.000,00	2.067.430.030,00	64.576.360.000,00	61.638.814.900,00	639.639.616.571,00	610.160.112.904,00	-29.479.503.667,00		

SIPD-R1 : dicetak pada 2025-10-22 11:17:37

13 OCT 2025
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19320411 201001 1 014

Kota Sawahlunto, 13 Oktober 2025

Walikota
ttd
RIYANDA PUTRA

Halaman 6